



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan: 1. Menteri Perindustrian; 2. Menteri Perdagangan; 3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 4. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKS Sabang).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	23 (dua puluh tiga)
Hari/Tanggal	:	Senin, 9 Juli 2018
W a k t u	:	Pukul 20.00 s.d 20.45 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	H. Dito Ganinduto, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPG), didampingi oleh: 1. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F.Gerindra).
Sekretaris Rapat	:	Eguh Setiawan, S.IP. (Pit. Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019; 2. Penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran Tahun 2019.
Hadir	:	1. 27 dari 51 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri Perindustrian beserta jajarannya; 3. Menteri Perdagangan beserta jajarannya; 4. Kepala BKPM beserta jajarannya; 5. Kepala BPKS Sabang beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Kepala BKPM, dan Kepala BPKS Sabang dibuka pukul 20.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja pada hari ini adalah dalam rangka membahas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan Penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran Tahun 2019.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Kepala BKPM, dan Kepala BPKS Sabang untuk menjelaskan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan Penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran Tahun 2019.

4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan atas penjelasan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Kepala BKPM, dan Kepala BPKS Sabang.

II. KESIMPULAN

A. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1. Komisi VI DPR RI menerima pagu indikatif anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor: S-269/MK.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018, tanggal 16 April 2018, sebesar Rp2.735.854.989.000,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp2.510.914.134.000,00 (dua triliun lima ratus sepuluh miliar sembilan ratus empat belas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan PNBP/BLU sebesar Rp224.940.855.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dialokasikan dalam 9 (sembilan) program sebagai berikut:
 - 1) Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian, sebesar Rp1.215.493.865.000,00
 - 2) Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro, sebesar Rp121.869.076.000,00
 - 3) Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, sebesar Rp127.204.542.000,00
 - 4) Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, sebesar Rp123.303.611.000,00
 - 5) Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, sebesar Rp305.566.781.000,00
 - 6) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian, sebesar Rp45.449.543.000,00
 - 7) Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, sebesar Rp727.106.598.000,00
 - 8) Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri, sebesar Rp26.368.832.000,00
 - 9) Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional, sebesar Rp43.492.141.000,00.
2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp2.577.300.000.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) untuk menindaklanjuti agenda nasional "Making Indonesia 4.0" melalui implementasi industri 4.0 pada 5 (lima) sektor industri prioritas, serta peningkatan kualitas dan daya saing SDM industri melalui program pengembangan pendidikan vokasi, sehingga total anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2019 menjadi sebesar Rp5.313.154.989.000,00 (lima triliun tiga ratus tiga belas miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Selanjutnya, hasil penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2019 akan kami sampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi sebagai bahan penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2019.

B. KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1. Komisi VI DPR RI menerima pagu indikatif anggaran Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor: S-269/M.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018, tanggal 16 April 2018, sebesar Rp3.532.610.608.000,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh dua milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus delapan ribu rupiah) yang dialokasikan dalam 10 (sepuluh) program sebagai berikut:
 - 1) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp1.793.428.795.000,00
 - 2) Program Perdagangan Berjangka Komoditi dengan pagu sebesar Rp72.000.000.000,00
 - 3) Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebesar Rp255.865.746.000,00
 - 4) Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri, sebesar Rp148.617.706.000,00
 - 5) Program Pengembangan Ekspor Nasional sebesar Rp161.752.534.000,00
 - 6) Program Perundingan Perdagangan Internasional sebesar Rp152.200.926.000,00
 - 7) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan sebesar Rp785.188.435.000,00
 - 8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan sebesar Rp77.556.466.000,00
 - 9) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan sebesar Rp46.000.000.000,00
 - 10) Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan sebesar Rp40.000.000.000,00.
2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2019 sesuai dengan surat Menteri Perdagangan Nomor: 755/M-DAG/SD/6/2018 tanggal 22 Juni 2018 sebesar Rp814.150.825.730,00 (Delapan Ratus Empat Belas Miliar Seratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) untuk kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan, Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional, Pengembangan Promosi dan Citra, dan Peningkatan Tertib Niaga, sehingga total anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2019 menjadi sebesar Rp4.346.761.433.730,00 (empat triliun tiga ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Selanjutnya, hasil penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2019 akan kami sampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi sebagai bahan penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2019.

C. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)

1. Komisi VI DPR RI menerima pagu indikatif anggaran BKPM Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor: S-269/MK.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018, tanggal 16 April 2018, sebesar Rp516.060.891.000,00 (lima ratus enam belas miliar enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian alokasi program sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM sebesar Rp228.877.542.000,00
 - b. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal sebesar Rp287.183.349.000,00.

2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran BKPM, sesuai Surat Nomor 223/A.1/2018 tanggal 30 Mei 2018, BKPM mengusulkan tambahan anggaran T.A. 2019 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, yaitu sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) untuk mendukung percepatan implementasi sistem *online single submission*, sehingga dengan demikian total anggaran BKPM Tahun Anggaran 2019 menjadi sebesar Rp716.060.891.000 (tujuh ratus enam belas miliar enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya, hasil penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran BKPM Tahun 2019 akan kami sampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi sebagai bahan penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2019.

D. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS SABANG)

1. Komisi VI DPR RI menerima pagu indikatif anggaran BPKS Sabang Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor: S-269/MK.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018, tanggal 16 April 2018, sebesar Rp221.429.833.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp213.729.833.000,00 (dua ratus tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan BLU BPKS Sabang sebesar Rp7.700.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian alokasi program:
 - a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp38.634.062.000,00.
 - b. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebesar Rp175.095.771.000,00.
2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran BPKS Sabang dari Rupiah Murni sebesar Rp226.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar rupiah) yang akan digunakan antara lain untuk pembangunan Sabang *Water Front Harbors* (WTH), sehingga total anggaran BPKS Sabang menjadi sebesar Rp447.429.833.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Selanjutnya, hasil penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran BPKS Sabang Tahun 2019 akan kami sampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi sebagai bahan penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2019.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 20.45 WIB.